

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Bungin, M. B. (2009). *Metodologi Penelitian Kuantitatif Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*. Kencana.
- Chorib, S., Boedirjanto, & Pardede, A. (2005). *Pengurusan Piutang Negara*. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan RI.
- Depkominfo. (2009). *Rencana Strategis Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009-2015*. Depkominfo.
- Depkominfo. (2010a). *Kilas Balik 2004-2009 Departemen Komunikasi dan Informatika. Kemajuan Sinergi dan Keadaban Menuju Masyarakat Informasi*. Depkominfo.
- Depkominfo. (2010b). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Departemen Komunikasi dan Informatika Tahun 2009*. Depkominfo.
- Indonesia Connected, (2011).
- KMK Nomor 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP), (2006).
- Kusuma, H. (2020). *Jumlah Piutang Negara Capai Rp 75 T, Ini Sebarannya*. Finance.Detik.Com. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5281442/jumlah-piutang-negara-capai-rp-75-t-ini-sebarannya>
- Lembaga Informasi Nasional dan Yayasan Arena Komunikasi. (2003). *“Studi Kelayakan tentang Pembangunan Unit Pelayanan Informasi Terpadu di Daerah Rawan Konflik dan Daerah Terpencil.”*
- Mertokusumo, S. (2006). *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Liberty.
- Narimawati, U. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Agung Media.
- Patricia, W., & Pamungkas, B. (2004). Analisis Pengelolaan Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK 06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, (2021).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, (2020).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 24/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Perubahan atas c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER.KOMINFO/10/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya, (2010).

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, (2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang, (2009).

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika, (2009).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, (1960).

Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 3 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif PNBP di Kementerian Keuangan, (2020).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika., (2015).

PMK Nomor 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara, (2007).

PMK Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme Crash Program Tahun Anggaran 2021, (2021).

PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (2012).

PMK Nomor 207/PMK.06/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Negara Tidak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara, (2019).

PMK Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara, (2016).

PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, (2016).

Ratnawati, J., & Hernawati, R. I. (2016). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.

RI, Kementerian Kominfo. (2021). *Pencabutan Izin Pita Frekuensi Radio Pita Frekuensi 450 MHz PT Net Satu Indonesia*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika. https://kominfo.go.id/content/detail/%0A38428/siaran-pers-no-418hmkominfo122021-tentang-pencabutan-izinpita-%0Afrekuensi-radio-pita-frekuensi-450-mhz-pt-net-satu-indonesia/0/siaran%0A_pers

Riduwan. (2010). *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*. Alfabeta.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (2004).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, (2008).

Zed, M. (2003). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.